

01

# PENYEBARLUASAN INFORMASI PENELITIAN DAN HASIL-HASILNYA LEWAT MEDIA MASSA : SUATU ALTERNATIF STRATEGI KEHUMASAN

*Drs. Soedito Sosrodihardjo\*)*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Pengantar Menuju Prolematika

Pembangunan merupakan proses transformasi yang terencana dan kompleks, dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten dalam satu lingkungan strategis yang dinamis. Dalam proses pembangunan yaitu tidak dapat dipungkiri perkembangan Iptek sangat erat dan mewarnai perubahan dalam sistem produksi perdagangan dan hubungan internasional. Kemandirian ekonomi dengan demikian akan diperoleh melalui kemampuan, pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan nilai tambah dalam proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa.

Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa kemampuan Iptek sumber daya alam yang melimpah tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping peran dalam proses nilai tambah di bidang industri serta pengendalian pemanfaatan SDA, Iptek juga diperlukan dalam membentuk masyarakat yang berorientasi pada masa depan serta responsif pada tanda-tanda perubahan.

Di masa lalu, Iptek telah mendukung kemajuan industri dan jasa sehingga mampu merubah struktur ekonomi nasional yakni pada

tahun 1970-an sektor industri menyumbang 9,2% pada PDB dan pada tahun 1995 sumbangan tersebut meningkat menjadi 24,3%. Sementara sumbangan sektor pertanian turun dari 49,3% menjadi 17,2%. Ini dapat diartikan bahwa terjadi transformasi dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri. Kemampuan ini rusak pada tahun 1997 karena krisis ekonomi yang masih berlangsung hingga sekarang.

### 1.2 Iptek dalam Pembangunan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia yang hidup tanpa adanya dimensi jarak dan waktu. Perbedaan lokasi geografis dan batas negara bukan lagi merupakan hambatan utama. Berbagai kebijakan disuatu negara semakin terikat pada ketentuan ekonomi global. Dalam situasi pasar global tersebut negara maju lebih diuntungkan posisinya karena kemampuannya dalam iptek, yakni pengintegrasian unsur kelembagaan iptek dengan kelembagaan yang memanfaatkan iptek dalam produksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis; kemampuannya menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif sehingga persaingan antar

---

\*) Dalam kariernya Pegawai Negeri Sipil pernah menjabat Kepala Biro Hubungan Masyarakat LIPI pada tahun 1978-an, dan selanjutnya pernah menjabat Asisten Deputi di lingkungan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (Asdep KMNRT), serta di lingkungan Sekretariat Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja. tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan barang dan kemampuannya menumbuhkan daya dukung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

GBHN 1999-2004 menggariskan bangsa Indonesia harus menyadari fungsi dan peran iptek untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta secara sungguh-sungguh melaksanakan langkah, memperkuat, penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek.

### 1.3 Peran Hubungan Masyarakat dalam Institusi Iptek

Unit hubungan masyarakat setiap institusi iptek harus menyadari bahwa iptek. sebagai bidang atau sektor (atau istilah sekarang "area") pembangunan selalu berubah statusnya, mulai dari sub sektor Pelita I), sektor, hingga bidang pembangunan. Ataupun iptek ditempatkan dalam lingkup bidang kesejahteraan rakyat kemudian berubah menjadi dalam lingkup bidang ekonomi, atau bahkan menjadi bidang tersendiri (Pelita VI). Demikian pula institusi iptek dapat berubah status. Dimasa lalu kita mengenal Menteri Negara Riset, juga Menteri Negara Riset dan Teknologi. Dalam Pelita I status LIPI sangat tinggi karena kewenangan untuk "mengkoordinir" dan merumuskan kebijakan iptek, kewenangan ini dihapus pada Pelita berikutnya dan bahkan terminologi "Ketua LIPI" diubah menjadi "Kepala LIPI". Ketua merujuk kepada prinsip "Primus Inter pares" sedangkan "Kepala" merujuk pada jenjang birokrasi. Lihatlah bagaimana Departemen Penerangan dieliminasi, demikian pula Departemen Sosial. Itu semua menunjukkan belum adanya persepsi dan "Political Will" yang menempatkan iptek dan infrastrukturnya dalam kedudukan "condition sine qua non" bagi kemajuan bangsa.

Dalam situasi yang demikian unit kehumasan harus mampu menyusun kebijakan strategis pelaksanaan program untuk

menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan wibawa institusi iptek. Agar hasil kinerjanya (hasil litbang dan lainnya) dapat langsung dimanfaatkan oleh elemen produktif bangsa maupun masyarakat. Bila kebijakan itu telah tersusun, maka dikembangkanlah strategi pemanfaatan media massa untuk tujuan tersebut.

## II. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

### 2.1 Kecenderungan Dunia

Masyarakat, ekonomi dan lingkungan global serta nasional akan terus mengalami perubahan yang cukup fundamental yang arahnya belum diketahui dengan pasti. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa kekuatan yang mempengaruhi perkembangan dunia tersebut. Penduduk adalah salah satu kekuatan yang besar pengaruhnya terhadap kondisi global maupun nasional kita. Pertambahan penduduk dunia yang sangat tinggi dan jumlah penduduk yang besar akan berdampak global pula. *Global divisions* berdasar penduduk akan bertambah tajam karena negara-negara industri yang berpenduduk semakin tua (*ageing population*) akan terus mempertahankan standar kehidupan yang tinggi dan melindungi diri dari tekanan penduduk di bagian dunia lain. Sumber alam di dunia diperkirakan masih cukup untuk mendukung 7 milyar manusia pada tahun 2020, namun distribusi sumber alam yang tidak merata akan terus terjadi sehingga negara-negara berkembang masih akan terus kekurangan makanan, air, dan energi yang menjadi sumber ketegangan.

Kelompok kelas menengah di negara-negara industri baru terus meningkatkan kemampuan pasar domestik mereka dan meningkatkan tuntutan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Hubungan internasional didominasi oleh empat kecenderungan politik yakni hancurnya komunisme, regionalisme, demokratisasi, serta apresiasi yang sangat besar terhadap

kekuatan-kekuatan pasar.

Internasionalisasi ekonomi dan pengembangan pasar global akan berlanjut hingga tahun 2020. Perkembangan industri pelayanan akan menjadi kecenderungan global karena kemajuan teknologi komunikasi dengan kemampuan penyediaan informasi *Nanotechnology* akan berkembang pesat pada masa depan, yang memungkinkan manusia menciptakan bahan baru serta mengembangkan cara baru untuk mengobati penyakit. Liberalisasi sistem perdagangan menciptakan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk memperbaiki kualitas, biaya dan pengiriman produk berdasar standar internasional.

## 2.2 Perubahan Peran Pemerintah

Dampak krisis ekonomi (1997-sekarang) yang berkepanjangan, reformasi tatanan pemerintahan, dan meningkatnya pengaruh globalisasi telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (reformasi UUD 45, Pemilihan Langsung Pejabat Negara, Desentralisasi, Kehidupan Pers dan sebagainya).

UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah merubah lingkup peran pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di bidang Iptek. Dengan kata lain, kebijakan otonomi daerah menekankan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan semua potensi yang dimiliki sumber daya ipteknya secara lebih efektif, efisien dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat daerah. *Wewenang pemerintah pusat di bidang iptek akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan-kebijakan iptek yang strategis.*

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2000 tentang 4 Program Pembangunan Nasional, program nasional di bidang iptek adalah meningkatkan pembangunan ekonomi melalui: (1) program peningkatan iptek dunia usaha; (2) program disemenaasi informasi teknologi,

dan meningkatkan pembangunan bidang pendidikan melalui; (3) program di bidang penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya iptek serta (4) peningkatan kemandirian dan keunggulan iptek.

Krisis ekonomi juga telah membawa perubahan pada mengecilnya anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan iptek. Ini membuat pentingnya penajaman pada program dan kearifan dalam menentukan prioritas.

Perubahan juga terjadi dengan berlangsungnya peran pemerintah dari pelaku utama menjadi *fasilitator* yang menumbuhkan kesadaran dan pemahaman serta menciptakan iklim yang kondusif. Peran swasta akan lebih menentukan perkembangan iptek di masa datang. Diharapkan swasta memiliki kemampuan pendanaan 80 %, sedangkan pemerintah akan memberikan kontribusi hanya 20 % dari total anggaran nasional untuk iptek.

## III. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN MEDIA MASSA

### 3.1 Kemajuan Teknologi

Perkembangan ekonomi global berdasar mekanisme pasar bebas telah didorong oleh tiga jenis teknologi yaitu, teknologi transportasi, teknologi produksi, dan teknologi informasi. Ketiga jenis teknologi ini telah memperluas dan mempercepat perpindahan barang jasa, informasi, modal dan manusia antar wilayah dan antar negara.

### 3.2 Teknologi Media Massa

Sementara itu kemajuan teknologi informasi telah memicu tumbuhnya teknologi canggih di bidang perekaman, percetakan (*printing*), penyiaran dan teknologi lain, yang secara "*real time*" cepat dan jangkauan yang luas dalam menyajikan berita dalam bentuk gabungan visual dan auditif yang dilengkapi dengan teknologi telekomunikasi sehingga

terjadi komunikasi interaktif dengan penonton.

Sedemikian besar peran dalam pengaruh teknologi media masa ini (media cetak media elektronik, komputer, telekomunikasi dan internet) membentuk opini masyarakat sehingga media massa dianggap sebagai salah satu dari pilar demokrasi yang penting derasnya aliran informasi mengakibatkan setiap isu (*events*) hanya mampu diekspos dalam waktu singkat sehingga memori kolektif masyarakat sangat pendek.

Pemanfaatan media massa di Indonesia sangat strategis sifatnya karena luas jangkauan dan kelebihan-kelebihan lain bila ditinjau dari luas wilayah negara dan bentuk-bentuk wilayah geografisnya. Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berdasarkan Dewan Pers: media cetak 835 penerbitan yang terdiri dari 252 surat kabar (harian), mingguan 349 buah dan 6 bulletin. Semenantara itu data dari PRSSNI tercatat 831 stasiun radio swasta dengan 42 buah berada di DKI Jakarta jumlah organisasi wartawan cukup banyak.

Dalam dinamika perkembangannya, terjadi kerja sama stasiun radio baik dalam satu propinsi atau antar propinsi sehingga terbentuk jaringan kerja sama penyiaran melalui relay, seperti jaringan stasiun Trijaya FM dan jaringan El Shinta. Gejala kedua adalah terbangunnya kerja sama antar stasiun televisi dengan stasiun radio dan media cetak. Gejala ketiga adalah "*masuknya*" stasiun siaran radio luar negeri (ABC, BBC, *Voice of America*, Radio Singapura, CNN dan lain-lain) kedalam sistem siaran radio swasta melalui relay. Hal tersebut dapat memberi gambaran dampak globalisasi dalam system informasi. Dewasa ini media massa juga dimanfaatkan untuk melakukan "*public polling*" yang dapat memberikan gambaran persepsi dan preferensi maupun sikap masyarakat terhadap sesuatu hal. *Rating* terhadap acara-acara stasiun TV juga dilakukan oleh lembaga swasta pada tingkat nasional maupun regional.

Bagi Unit Hubungan Masyarakat suatu institusi iptek perlu membangun kemitraan dengan media massa agar informasi Iptek (penelitian dan kegiatan ilmiah) dapat

disebarluaskan ke masyarakat luas atau lapisan masyarakat tertentu. Dengan kerja sama tersebut dapat dicapai sasaran-sasaran antara informasi Iptek merupakan bagian integral dari informasi pembangunan berkehidupan masyarakat, dan sasaran lain yakni berkembangnya kemampuan wartawan dalam menyajikan informasi Iptek (*science reporting*). Kita harus melangkah lebih maju dari sekedar menyebarkan informasi iptek ke masyarakat luas, yakni diseminasi hasil iptek tersebut dapat ditangkap dan dimanfaatkan oleh dunia bisnis dan industri (bursa teknologi, temu bisnis teknologi dan sebagainya).

Untuk dapat menyusun strategi penyebaran informasi Iptek melalui media massa, maka diperlukan persiapan yang terdiri dari beberapa tahapan.

#### IV. TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI

- 1) Tahap penyusunan kebutuhan penyebarluasan informasi Iptek pada masyarakat luas, visi dan tujuan pemanfaatan media massa.
- 2) Tahap pengenalan akan kondisi pemasyarakatan Iptek oleh Institusi Iptek dewasa ini.
- 3) Tahap pengenalan pada jenis-jenis media massa: luas jangkauan penyebaran, tersedianya waktu (slot), rubrik dan kemampuan institusi iptek untuk menyediakan data dan informasi yang dikemas untuk media massa.
- 4) Tahap pengenalan tantangan pembangunan Iptek untuk menetapkan isu-isu strategis Iptek antara lain:
  - a) Pembentukan keunggulan dan kemandirian;
  - b) Daya saing *seller* produksi;
  - c) Kerja sama kemitraan antara institusi Iptek dengan sektor produksi
  - d) Peningkatan kemampuan UKM di sektor teknologi
- 5) Tahap pengenalan kelemahan kinerja Unit Kehumasan dan Penyempurnaan yang diperlukan (kualitas SDM, sarana dan

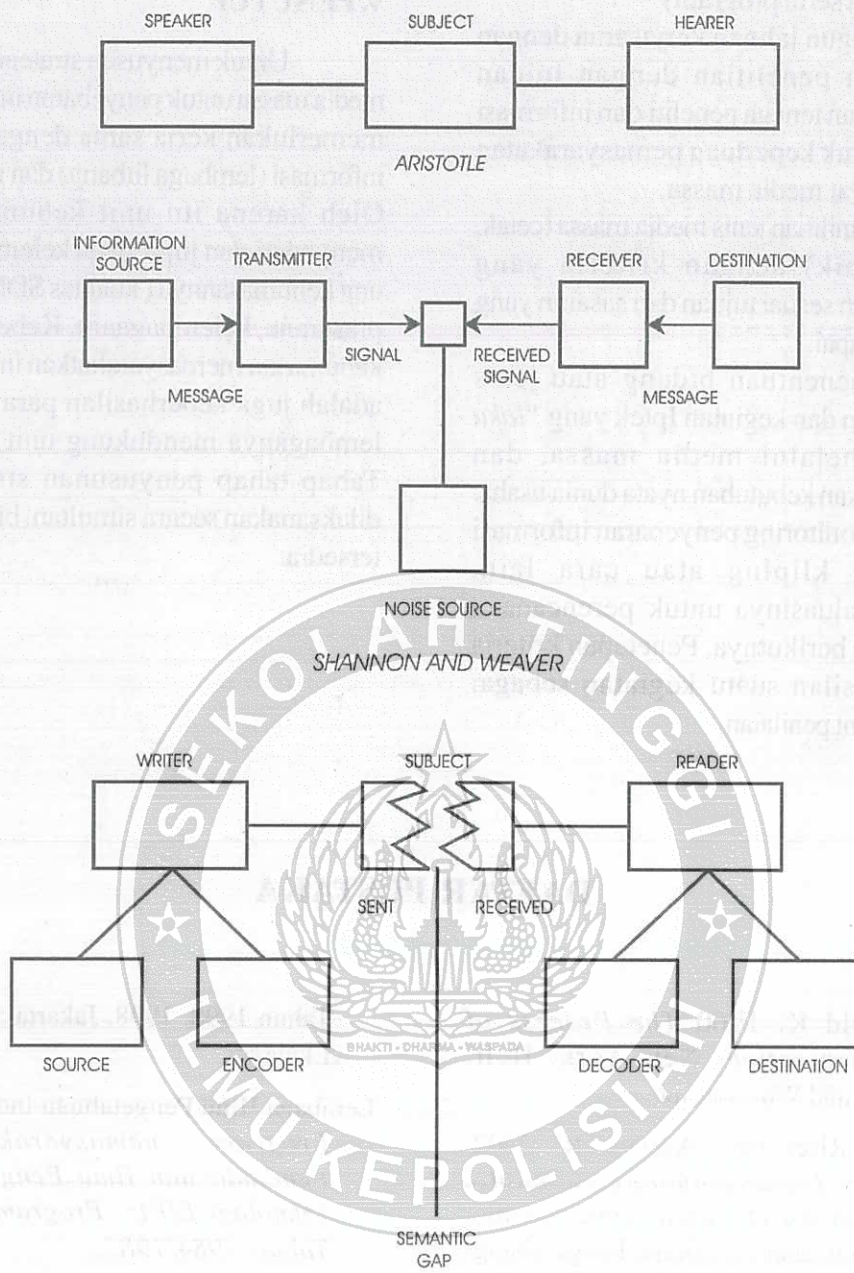
- prasarana serta program)
- 6) Membangun jalinan kerjasama dengan unit-unit penelitian dengan tujuan penyediaan tenaga peneliti dan informasi Iptek untuk keperluan pemasyarakatan Iptek lewat media massa.
  - 7) Tahap pemilihan jenis media massa (cetak, elektronik) dengan kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
  - 8) Tahap penentuan bidang atau jenis penelitian dan kegiatan Iptek yang "laku jual" melalui media massa, dan berdasarkan kebutuhan nyata dunia usaha.
  - 9) Tahap monitoring penyebaran informasi melalui kliping atau cara lain, mengevaluasinya untuk perencanaan program berikutnya. Penetapan kriteria keberhasilan suatu kegiatan sebagai instrument penilaian.

## V. PENUTUP

Untuk menyusun strategi penggunaan media massa untuk penyebaran informasi Iptek memerlukan kerja sama dengan penghasil informasi (lembaga litbang) dan media massa. Oleh karena itu unit kehumasan harus menyadari dan jujur pada kelemahan kinerja unit kehumasannya (kualitas SDM, sarana dan prasarana, kelembagaan). Keberhasilan unit kehumasan memasyarakatkan informasi iptek adalah juga keberhasilan para peneliti dan lembaganya mendukung unit kehumasan. Tahap-tahap penyusunan strategi dapat dilaksanakan secara simultan, bila data sudah tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berlo, David K. 1960 *The Process of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc
- , 2002. Jakarta: *Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Ketetapan MPR RI Tahun 1993. 1993. Jakarta: Badan Penerbit Alda.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998. 1998. Jakarta : Penerbit CV. Ekajaya.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1985. *Program pemasyarakatan dan Pembudayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi LIPI: Program Repelita IV Tahun 1984/1985*.
- Merrihue, William Vo. 1960. *Managing by Communication*. New York: Mc. Graw Hill Book Company, Inc.
- Ruesch, Jurgen and G. Bateson. 1995. *Communication*, New York: W. W. Norton and Company, Inc
- Schramm, Wilbur, ed. 1960. *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana., W : University of Illinois Press



A MODEL FOR BUSINESS WRITING

**EVALUASI BEBERAPA MEDIA**

MEDIA *)	JANGKAUAN **) PENYEBARAN	TERSEDIANYA MEDIA	BIAYA OPERASIONAL	TENAGA PROFESIONAL	KEMUNGKINAN KERJA SAMA	JUMLAH NILAI
RADIO						
TELEVISI						
SURAT KABAR						
MAJALAH						
PERTEMUAN						
PAMERAN						
SHOW						
INTERNET						
PUBLIKASI						

\*) Jenis media ini dapat ditambah/dikurang

\*\*) Variabel pembobotan dapat ditambah/dikurangi

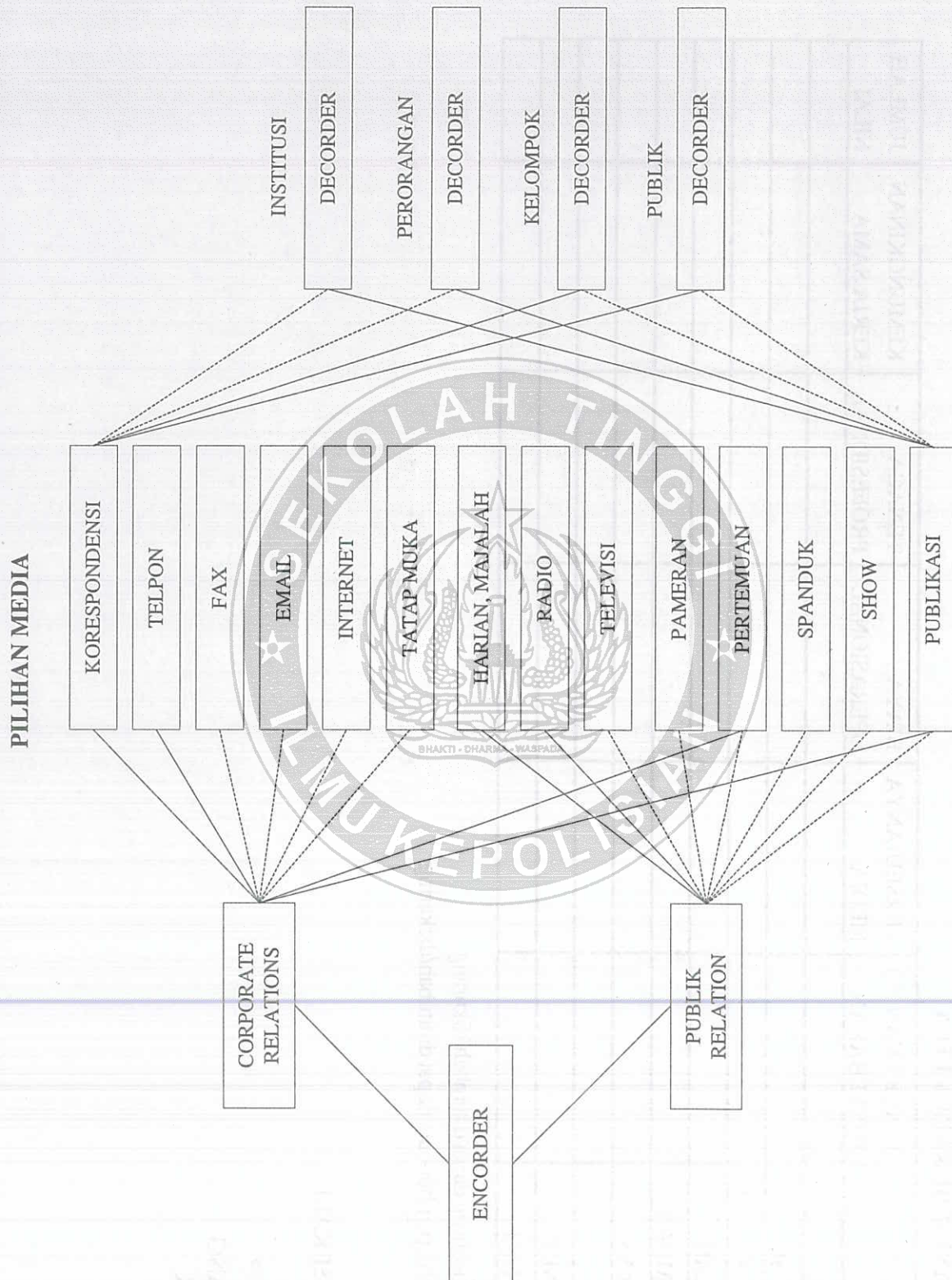
5-BAIK SEKALI

4-BAIK

3-CUKUP

2-KURANG

1-JELEK





**TINGKAT KEBIJAKAN**

<b>JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>LEVEL</b>	<b>ALTERNATIF SUBSTANSI</b>
Kebijakan Strategis Nasional	Nasional Strategi Umum Nasional	Tinjauan kondisi lingkungan, landasan dan tujuan, modal yang dimiliki, peluang dan tantangan, Visi dan Misi serta tujuan strategis, pendekatan dan rumusan strategi umum
Kebijakan Strategis Institusional	Institusional, Tupoksi, Strategi Khusus	Tinjauan kondisi/lingkungan strategis, landasan dan tujuan, peluang dan tantangan, modal yang dimiliki, visi dan misi, Prioritas, tujuan dan sasaran, pendekatan
Strategi Pelaksanaan Kebijakan Bidang	Unitim Organisasi, Tupoksi, Taktik (Strategi Operasional)	Penilaian kritis terhadap kemampuan dan kelemahan sumber daya organisasi, penilaian kritis terhadap kondisi lingkungan, prioritas sasaran yang harus dicapai, penetapan penjadwalan, penetapan criteria keberhasilan.
Rencana Taktis Pencapaian Sasaran Sektoral	Sub unit Organisasi, Tupoksi, Teknik (Pelaksanaan Rinci Terjadwal)	Penilaian terhadap sumber daya: kualitas dan jumlah, penetapan sasaran secara selektif, penjadwalan, criteria keberhasilan, evaluasi berulang secara periodik

**CONTOH KEBIJAKAN**

JENIS KEBIJAKAN	LEVEL	ALTERNATIF SUBSTANSI
Kebijakan Strategis Nasional	Menristek	Seluruh program penguasaan pengembangan, pemanfaatan IPTEK, Umum dan garis besar
Kebijakan Strategis Instiusional	LPI	Seluruh bidang tugas pokok dan fungsi LPI umum dan menggariskan program utama
Strategi Pelaksanaan Program	BIRO, PUSLIT	Rincian strategis program yang menjadi tanggung jawab BIRO PUSLIT
Rencana Taktis Pencapaian Sasaran Terpilih	Bagian	Rincian Sasaran Terbatas, Penjadwalan, dan Evaluasi berkala berdasar criteria